

SI TOU TIMOU TUMOU TOU DAN MAPALUS SEBAGAI PARADIGMA MISI GEREJA

Jeane Marie Tulung¹, Alter Imanuel Wowor²

¹ Rektor IAKN Manado, ²Dosen Fakultas Teologi, IAKN Manado

Email: ¹jeanetulung@yahoo.com, ²alterimanuel@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk mengemukakan bahwa gereja merupakan suatu kehadiran teologis-sosial dalam ruang publik, sekaligus juga memberi cara pandang yang lain untuk merumuskan kembali paradigma dan identitas misional Kekristenan (gereja) dalam suatu sistem sosial. Dengan maksud yang demikian, maka penulis mengambil falsafah si tou timou tumou tou dan mapalus dalam rangka membantu gereja untuk merekonstruksi identitas misionalnya sebagai bentuk paradoks atau alternatif terhadap menguatnya individualisme masyarakat/komunitas dalam ruang publik yang disebut Indonesia.

Kata Kunci : Sitou timou tou, Mapalus, Misi Gereja

PENDAHULUAN

Gereja bukanlah suatu institusi atau komunitas yang terpisah dari negara, tetapi sebaliknya, gereja merupakan bagian integral dari suatu negara. Dalam skala yang lebih luas, secara eksistensial, gereja merupakan bagian dan berada di dalam dunia ini. Dengan demikian, gereja bukanlah suatu komunitas atau institusi yang harusnya mengisolasi diri, apalagi terisolasi dari dunia, negara, atau dunia sosial.

Dalam perkembangan komunitas Kristen sejak mula-mula, gereja atau Kekristenan tidak bisa dilepaskan dari misi Kristen. Dalam sejarah Kekristenan, misi Kristen mendapat interpretasi yang berbeda-beda sesuai keberadaan zaman dan konteks di mana komunitas/gereja itu ada. Dengan demikian, ketika mempelajari misi Kristen, yang secara dogmatis disebut sebagai *Missio Dei* atau misi Allah, maka kita akan menemukan disparitas konsep tentang misi itu sendiri atau dalam

misiologi dikatakan terjadinya pergeseran paradigma misi.

Dalam mengimplementasikan paradigma misi yang berbeda-beda oleh berbagai denominasi gereja, akhirnya mengakibatkan gereja atau umat Kristen kemudian dikenal dengan berbagai identitas atau sebutan, antara lain: agama kolonial, kristenisasi, agama kerajaan-borjuis, komunitas kasih-solidaritas, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang seperti yang sudah diungkapkan di atas, perlu disadari bahwa disparitas paradigma misi akan mengakibatkan terjadinya multiplisitas identitas Kristen yang bisa membawa dampak yang baik sekaligus juga dampak yang buruk bagi tubuh Kekristenan sendiri maupun berbagai entitas di luar tubuh Kekristenan. Identitas Kekristenan tentu saja akan mempengaruhi kehidupan umat Kristen dalam berinteraksi dan bergaul dalam dunia sosial atau ruang publik di mana dia hadir, hidup, dan beraktivitas di dalamnya.

SI TOU TIMOU TUMOU TOU

Dalam sejarah kehidupan rakyat atau suku di Minahasa, ada suatu falsafah yang dipegang sebagai pemersatu rakyat, yang sekaligus juga dijadikan dasar bagi identitas rakyat Minahasa. Falsafah tersebut adalah *si tou timou tumou tou*.

Menurut A.O.D. Pangaila¹, secara etimologis, ungkapan atau falsafah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Si adalah penunjuk orang, *tou* artinya manusia. Kedua kata ini berarti: (1) Manusia sebagai makhluk hidup, manusia insani, manusia kodrat. (2) Manusia mampu berdiri sendiri secara dewasa dan bertanggung jawab.

Timou: Tou = “manusia” + infiks “im.” Artinya: (1) Dilahirkan hidup. (2) Hidup; hidup sebagai manusia. (3) Hidup sebagai manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri.

Tumou: Tou + infiks “um.” Artinya: (1) Mendorong, memberi semangat hidup, mendewasakan kehidupan sesama manusia. (2) Ikut bertanggung jawab atas kehidupan sesama manusia. (3) Tidak hidup semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan sesama manusia. (4) Turut membentuk kehidupan sesama manusia.

Seluruh pengertian di atas, termasuk dalam pengertian *si tou timou tumou tou* atau sering disingkat ST4, sehingga keseluruhan ungkapan ini mengandung pengertian:

1. Bahwa manusia dilahirkan dan hidup sebagai manusia.
2. Bahwa manusia yang hidup, adalah hidup secara dewasa, bertanggung jawab dan mandiri.
3. Manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri ditandai oleh “pengabdian” untuk “membentuk dan melahirkan” manusia-manusia baru yang dewasa, bertanggung jawab, dan mandiri kelak di kemudian hari, untuk selanjutnya, manusia baru yang terbentuk itu melanjutkan lagi tugas pengabdian dalam rangka “memanusiakan” sesamanya.

Sondakh menyatakan bahwa *si tou timou tumou tou* merupakan konsep sikap yang ditentukan oleh norma serta konsep-konsep nilai budaya yang dianutnya. Konsep nilai budaya, memuat ide-ide atau nilai-nilai dasar yang saling berkaitan, menjiwai, mengisi, serta saling memperkuat menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagai satu wawasan atau pandangan hidup. Nilai-nilai dasar itu, selain berfungsi sebagai landasan, sekaligus juga sebagai pendorong, pengendali kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun untuk pengembangan dirinya (Sondakh 2002, 21).

Si tou timou tumou tou, dengan demikian, merupakan konsep abstrak dari nilai-nilai budaya dan pengalaman hidup manusia Minahasa. Selain memuat nilai-nilai dasar, juga menggambarkan apa yang dianggap paling penting atau bermakna yang mendasari dan menuntun

¹ A.O.D. Pangaila, “Wawasan Sumekolah dan Pandangan Hidup *Si Tou Timou Tumou Tou*,” Diskusi panel MBH-Manado, Februari 1995, dikutip dalam A.J. Sondakh, *Si*

Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Evolusi Nilai-nilai Manusia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 18-20.

keberhasilannya sebagai *tou* Minahasa. *Si tou timou tumou tou*, dengan demikian menjadi gambaran identitas atau jati diri *tou* (manusia atau orang) Minahasa (Sondakh 2002, 21-22).

Sebagai konsep filosofis, *si tou timou tumou tou* memiliki substansi ideal normatif yang masih harus diejawantahkan dalam kehidupan moral-etik masyarakat. Dengan kata lain, implementasi nilai dan konsep yang terkandung dalam ungkapan ini masih perlu dirumuskan dalam satu konsep aktual yang berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan transformasi sikap dan perilaku masyarakat agar menjadi yang berkualitas maju, mandiri, dan beradab (Sondakh 2002, 22). Selain itu, *tou* dalam konsep *tumou tou* merupakan akomodasi dan integrasi dari tiga sistem nilai yang dihidupinya, yakni *tou ente*, *tou ngaasan*, dan *tou sama* (Sondakh 2002, 32).

Tou ente merupakan istilah yang menunjukkan tentang konsep “manusia unggul *tou* Minahasa” berdasarkan sistem adat/budaya dari kelompok etnik pribumi Minahasa pada periode histori-mistikal. *Tou ente* kadang disebut juga *tou keter*, yang berarti orang kuat atau gagah berani (Sondakh 2002, 39-40). *Tou ente* sering dikenakan pada pimpinan kelompok masyarakat dalam sistem adat Minahasa. Para pemimpin masyarakat itu tidak hanya menjadi pemimpin ritual atau upacara keagamaan, tetapi juga mengajar orang muda, memberikan nasehat, mengobati orang sakit atau celaka, memberi penginapan pada tamu dari luar kewedanan, mempunyai otak (wawasan/pengetahuan) untuk mengurus rakyat yang dipimpinnya, mempunyai hati, keberanian, memiliki keuletan dalam menghadapi segala persoalan *taranak* atau *roong* (keluarga besar, negeri, atau kampung), dan sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, serta menjadi

pelindung *taranak* atau *roong* (Sondakh 2002, 45-48, 51).

Tou ngaasan esensinya menunjuk ke istilah *ngaas*, yang berarti otak yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Konsep ini kemudian berkembang dan dipopulerkan dengan istilah *sumekolah* (pergi ke sekolah/menuntut ilmu) (Sondakh 2002, 87-88). Kalau *tou ente* lebih mengandalkan kekuatan fisik dipadukan dengan kekuatan mistik dan gaib yang bersifat irasional, maka konsep *ngaasan* lebih mengandalkan kemampuan intelektual, yang bersifat rasional objektif, sebagai kunci utama menjawab misteri alam dan kehidupan yang aman, baik, dan sejahtera. Melalui pendidikan, *tou* Minahasa berupaya agar *ngaas* atau otak yang berisi ilmu pengetahuan dan teknologi, orang memperoleh keterampilan yang dapat digunakan sebagai kiat dan alat untuk meraih kehidupan yang lebih baik, meningkatkan harkat dan martabat diri sebagai subjek, menjadi orang yang baik, dan berhasil serta berguna, atau untuk menjadi berkat bagi sesama (*si tou timou, tumou tou*) (Sondakh 2002, 91-92).

Menurut Sondakh, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya konsep *tou ngaasan*, telah tumbuh dan berkembang pula konsep *tou sama* atau *tou leos*, yang berarti orang baik, bukan terutama dari segi fisik atau lahiriah tetapi terutama batiniahnya. Konsep tersebut diwarnai dengan nilai teologi agama Kristen yang masuk ke Minahasa melalui para misionaris. Falsafah *si tou timou tumou tou* yang dirumuskan oleh Sam Ratulangi, akarnya ada di dalam ajaran agama Kristen, yaitu “kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri” (Sondakh 2002, 113-114).

Sondakh menjelaskan bahwa *tou ente* atau *tou keter* belum tentu adalah *tou sama*, demikian juga dengan *tou ngaasan*,

belum tentu adalah *tou sama*, bisa saja mereka adalah *tou lewo* yang menggunakan kekuatan fisik ataupun akalinya untuk “merugikan atau mencelakakan orang lain” (*si tou timou tumongko tou*). *Tou sama*, diartikan sebagai “manusia yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budinya, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri” (Matius 22:37-39). Manusia seperti itu, jelas tidak mengandalkan kemampuan maupun keinginannya sendiri ataupun hanya mengasihi diri sendiri, apalagi mendewakan manusia. *Tou sama* dapat dikatakan juga sebagai *tou kasih*, yang intinya *baku baku bae deng baku baku sayang* (saling berbuat baik dan saling menyayangi) (Sondakh 2002, 134-135).

Mengutip Sinolungan, Sondakh mengemukakan bahwa ciri-ciri *tou sama* adalah sebagai berikut:

1. *Sama ase Opo Empung/ Wailan/ Mapiara/ Amang Kasuruan* (Tuhan Allah).
2. *Sama ase maperentah* (pemerintah).
3. *Sama ase matua* (orang tua).
4. *Sama ase penanaan* (suami/istri), *kakeletou, pook, karia* (sesama).

Intinya, yang ingin dijelaskan oleh konsep *tou sama* adalah manusia *timou* (lahir) bukan sekedar *tumou* (hidup, bertumbuh, *exist*), tetapi sekaligus adalah untuk *tumou tou* (menghidupkan sesamanya) (Sondakh 2002, 136-137).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafah *si tou timou tumou tou* merupakan dasar sekaligus tujuan hidup dari *tou* (manusia/orang/rakyat) Minahasa. Secara sederhana, *si tou timou tumou tou* berarti manusia hidup untuk memanusiaikan/menghidupkan manusia yang lain. Sekalipun falsafah tersebut terlihat begitu sederhana, yang hanya tersusun oleh beberapa kata, tetapi perlu

disadari bahwa falsafah atau konsep tersebut merupakan hasil rumusan yang dibentuk oleh banyak unsur dan merupakan hasil interpretasi yang panjang terhadap sejarah masyarakat serta kebudayaan di tanah Minahasa. Perpaduan dan keseimbangan antara konsep *tou ente/keter*, *tou ngaasan*, dan *tou sama/leos/loor* dalam falsafah tersebut merupakan esensi kehidupan manusia yang diharapkan mampu menghasilkan atau memfasilitasi manusia yang lain agar memiliki ketiga unsur itu juga, sehingga proses tersebut akan terus berkelanjutan.

MAPALUS

Selain falsafah *si tou timou tumou tou*, rakyat Minahasa juga mengenal istilah *mapalus* sebagai penunjuk identitasnya, sekaligus falsafah pemersatu rakyat. Menurut Adam, *mapalus* (disebut juga *maando*) merupakan sepatah perkataan bahasa Melayu Minahasa yang berarti “saling membalas.” Pengertiannya kemudian diperluas menjadi saling tolong menolong dalam segala macam pekerjaan, terutama dalam pekerjaan pertanian, pesta-pesta dan jamuan-jamuan makan, juga dalam mengumpulkan uang tunai bagi para anggota masing-masing (*mekekaya'an* = saling menyerahkan). *Mapalus* sendiri merupakan suatu kumpulan kaum pria dan wanita, masing-masing tersendiri atau campuran; tua dan muda ikut serta. Salah seorang dari mereka memegang pimpinan yang dipilih secara demokratis. Perkumpulan *mapalus* dapat dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai minat untuk itu atau diselenggarakan oleh pihak pemerintah (sering oleh pemerintah distrik dan pemerintah desa) (Adam 1976, 98-99).

Menurut Adam, praktik *mapalus* dalam bidang pertanian dapat

digambarkan sebagai berikut (Adam 1976, 99-102):

Kalau sudah pada waktunya untuk memulai pekerjaan bertani, maka tiap-tiap pemilik ladang/sawah pergi berkeliling menjumpai sesama penduduk kampung untuk membentuk suatu *mapalus*. Dengan demikian, di tiap-tiap kampung terbentuklah beberapa kelompok kecil, yaitu orang-orang yang merasa paling tertarik satu kepada yang lain. Pemuda yang jatuh cinta akan berusaha masuk dalam kumpulan (kecil) gadis pilihannya, untuk membantu sang gadis dalam pekerjaannya. Sekali suatu kelompok sudah terbentuk, maka selama tahun-tanaman berlangsung jaran sekali orang dapat diterima lagi. Ada kalanya para pemilik ladang/sawah dalam suatu lingkungan desa bergabung, itu disebut *sumanalulukar*.

Beginilah cara bekerja mereka. Dalam suatu rapat malam, lebih dulu ditentukan ladang/sawah siapa yang akan dikerjakan dan macam pekerjaan apa yang harus dilakukan. Esok harinya, setibanya mereka di ladang/sawah, pemimpin *mapalus* (disebut *sumesewung*) terlebih dahulu membagi-bagi tanah yang akan dikerjakan dalam petak-petak dan tiap-tiap anggota dipersilahkan untuk memilih satu petak. *Sumesewung* sendiri memilih petak yang masih tersisa dan sering jadinya yang paling sukar.

Pelanggaran terhadap peraturan *mapalus* diancam dengan hukuman berat. Tentu saja yang pertama-tama akan dihukum ialah orang-orang yang malas bekerja, tetapi juga mereka yang datang terlambat, mereka yang tidak membawa alat atau membawa alat-alat yang keliru, atau mereka yang kurang sopan dan tidak mau menurut perintah. Para pemalas akan diejek dengan bermacam-macam nyanyian bila rombongan *mapalus* sudah masuk kampung lagi (usai bekerja di ladang/sawah). Si pelanggar juga dapat didenda dengan harus menawarkan tembakau, sirih, pinang, dan kapur

kepada tiap-tiap orang sesama anggota, serta ladang/sawahnya yang dikerjakan paling akhir. Hukuman yang lain ialah dengan tidak memberikan ikan dan daging pada nasi, yang harus dimakan si pelanggar seorang diri, terpencil dari anggota lainnya, kadang-kadang dalam hujan atau ia mendapat pukulan dengan rotan atau tiga batang lidi (batang-batang daun nira) pada betisnya.

Tiap anggota mendapat giliran untuk dibantu. Apabila seseorang karena suatu hal berhalangan untuk datang, maka ia harus menunjuk penggantinya. Ada kalanya juga terjadi, suatu rombongan *mapalus* menyerahkan diri mereka sebagai tenaga sewaan kepada seorang tuan tanah, tetapi hendaknya pekerjaan mereka sendiri sudah selesai. Uang hasil usaha kemudian dibagi di antara para anggota atau juga dipakai untuk mengadakan suatu pesta *mapalus*, sesudah pekerjaan selesai.

Seiring pekerjaan *mapalus* itu dilakukan, pemilik tanah/lahan/sawah harus menyediakan makanan. Kalau pada satu hari ada beberapa ladang/sawah yang harus dikerjakan, maka makanan disediakan oleh para pemilik itu secara bersama. Lebih dulu mereka harus menentukan apa yang akan dimakan, akan tetapi ada juga kesepakatan agar orang-orang membawa makanannya sendiri (dinamakan *mesaputan*).

Dahulu, rombongan-rombongan *mapalus* diperlakukan dengan penuh hormat, bila rombongan pulang kembali dari pekerjaan, rombongan berkunjung ke rumah kepala distrik. Di sana para anggota *mapalus* dijamu dengan minuman arak. Perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak tiap tahun dibubarkan, melainkan bersifat langgeng.

Selain tulisan Adam, perspektif lain tentang *mapalus* juga dijelaskan oleh Graafland (Graafland 1991, 42-45):

Orang mengerjakan kebun bersama-sama, saling membantu (*mapalus* =

gotong royong), suatu sistem yang telah ada sejak dahulu kala dan niscaya berasal dari asas hidup kekeluargaan di Minahasa. Tidak hanya ketika bekerja di ladang, pada setiap pekerjaan berat pun, orang saling membantu.

Mapalus diterapkan di kebun manakala orang membuka, membersihkan, dan menanam lahan, serta menuainya. Ukuran perkumpulan itu bermacam-macam, orang malah memberi nama *mapalus* untuk suatu kerja sama yang terjalin di antara dua atau tiga orang. Tetapi biasanya, nama ini dipakai bila ada sepuluh, lima belas, dua puluh, bahkan sampai seratus orang atau lebih yang bekerja sama.

Orang mulai dengan menentukan bagaimana pengaturan pengerjaan atas suatu bidang tanah. Bila perkumpulan itu kecil, akan ditentukan untuk bekerja selama satu hari setiap kebun. Kalau perkumpulan itu lebih besar, luas tanah yang akan dikerjakan ditentukan terlebih dahulu. Bila suatu pekerjaan selesai, perkumpulan itu pindah ke tanah lain. Semua orang harus berkumpul pada waktu yang ditentukan. Bila perkumpulan itu besar, sejak subuh, sebelum matahari terbit, tifa dibunyikan, atau ada yang berkeliling memanggil orang dengan memukul gong.

Bila *mapalus* akan dimulai, dibicarakan dahulu jam mulai dan berakhirnya, dan karena setiap pemilik kebun harus menyediakan makanan bagi semua pekerja, juga ditentukan apa yang akan dimakan. Apa pun yang dilakukan seseorang, lebih atau kurang dari apa yang ditentukan, selalu dianggap salah.

Menurut Jan Turang², perikehidupan masyarakat asli Minahasa dijiwai dan diwarnai kehidupan mapalus, dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Asas mapalus adalah kekeluargaan, musyawarah, mufakat, kerja sama, dan religius, sedangkan prinsip mapalus adalah tolong-menolong, keterbukaan, disiplin kelompok, kebersamaan, daya guna dan hasil guna.

Bila dikaji sejarahnya, *mapalus* merupakan dasar bagi terbentuknya nama Minahasa. *Mapalus* sebagai nilai kebersamaan dan pemersatu seluruh rakyat Minahasa, pada mulanya lahir dari konsep esa atau disebut *maesa-esaan*. Menurut Petrus Sampul³, *maesa-esaan* terdiri atas sembilan esa yang disebut *siou esa*, yaitu: (1) *Esa wia si Opo Empung* (Tuhan); (2) *Esa un ate* (hati); (3) *Esa genang* (pikiran); (4) *Esa tetengkoren* (perintah); (5) *Esa paayangan* (pekerjaan); (6) *Esa nuwu/lila* (bahasa); (7) *Esa lalan/palapangan* (jalan); (8) *Esa roko* (pakaian); dan (9) *Esa lelemaan/lututuran* (tempat makan).

Konsep esa atau *maesa-esaan* menurut N.S. Kalangi⁴ adalah salah satu perwujudan dari asas resiprositas, yakni sisi lain dari budaya egalitarian, yang menekankan asas kesamaan hak sosial. Perwujudan lainnya yaitu “ikatan batin” (bahasa asli: *magenang-genangan*, *mailek-ilekan*, *maleos-leosan*) dan “kerja

² Jan Turang, “Manusia Minahasa: Prinsip Hidup Mapalus Masa Lampau-Sekarang-Mendatang,” Seminar KKK, Jakarta (Juni 1991), dikutip dalam A.J. Sondakh, *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Evolusi Nilai-nilai Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 76.

³ Petrus Sampul, “Kekuasaan (*Power*) Ditinjau dari Segi Filsafat Pancasila,” Seminar FISIP UNSRAT (1986), dikutip dalam A.J. Sondakh, *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou*

Minahasa): Refleksi Atas Evolusi Nilai-nilai Manusia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 75.

⁴ N.S. Kalangi, “Kebudayaan Minahasa,” dalam Koentjaraningrat, “Manusia dan Kebudayaan Indonesia,” Jakarta (1990), dikutip dalam A.J. Sondakh, *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Evolusi Nilai-nilai Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 75-76.

sama” (bahasa asli: *masawang-sawangan*, *matombo-tombolan*, dan *masule-sulean*). Kegiatan kerja sama tersebut dikenal dengan sebutan *mapalus*.

Menurut Wil Lundstrom-Burghoorn, *mapalus* merupakan ekspresi dari solidaritas dan simbol keesaan. *Cooperation* dan *exchange* (kerja sama dan saling memberi) merupakan inti dari *mapalus*. Istilah *mapalus* sendiri berasal dari istilah *palus*, yang berarti: (1) untuk menerima; menyentuh; sebagai contoh *ta'an nimapalus*, yang berarti penangkap; orang yang memegang; (2) untuk memberikan makanan atau pakaian, untuk menuangkan, misalnya *palusan kan*, yang berarti memberikan makanan yang sudah dimasak; *ipalus um bene*, mencurahkan atau memberikan beras atau nasi. Di samping itu, kelompok *mapalus* juga ada yang disebut dengan *mawean kuman*, yang berarti saling memberi makanan, yang berarti juga menyediakan makanan bagi semua anggota (Lundstrom-Burghoorn, 163-165).

Musyawarah yang merupakan perwujudan dari konsep *esa*, menurut Bert Supit disebut “Mina Esa,” yang pada tahun 1789, dieja oleh Residen Schierstein dalam *landraad* (musyawarah para *ukung* dan kepala *walak*⁵) dengan “Minahasa,” yang selanjutnya berkembang menjadi nama dari satu daerah yang meliputi seluruh *walak*.⁶ Berpangkal dari konsep *esa* dan *maesa-esaan* tersebut, maka digunakanlah nama “Minahasa” untuk daerah yang didiami oleh masyarakat etnis keturunan Toar Lumimuut (Sondakh 2002, 74).

Berdasarkan uraian di atas, maka *mapalus* sebagai suatu nilai moral sekaligus praksis, berarti suatu sikap

kebersamaan dalam melaksanakan dan menghasilkan sesuatu yang baik demi kebaikan bersama.

MENGUATNYA INDIVIDUALISME MASYARAKAT DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara berkembang. Dalam usaha mengembangkan negara ini ke arah yang lebih baik, pemerintah dan rakyat berada dalam hubungan mitra kerja. Artinya, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan dan membangun negara ini lebih baik, sebaliknya juga, masyarakat membutuhkan pemerintah dalam hal menjamin kelangsungan hidup mereka. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dengan visi dan misinya masing-masing, keduanya harus saling menopang demi kebaikan bersama.

Setelah masa orde baru berakhir dan digantikan dengan masa yang disebut reformasi, seakan membawa angin segar bagi seluruh bangsa Indonesia. Rezim pemerintah yang otoriter mulai digantikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Rakyat Indonesia seakan lepas dari kungkungan sistem dan kekuatan yang mengikat diri mereka. Dalam satu dekade terakhir, terlihat jelas dalam bidang politik bagaimana masyarakat menyambut “kemerdekaan” tersebut dengan penuh antusias lewat mendirikan berbagai partai politik dan organisasi masyarakat setelah berpuluh tahun sejak 1973 partai politik difusikan hanya menjadi tiga partai politik saja.

Dalam segi ekonomi, terlihat juga banyak masyarakat yang membuka lapangan usaha baru sebagai wujud

⁵ Walak artinya suku; ukung artinya pemimpin desa atau kelompok keluarga besar.

⁶ Bert Supit, “Manusia Minahasa.” Seminar KKK, Jakarta (Juni 1991), dikutip dalam

A.J. Sondakh, *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Evolusi Nilai-nilai Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 73-74.

kebebasan untuk berwirausaha, apalagi dengan ditopang lewat suntikan modal dari pemerintah lewat berbagai kebijakannya. Baik usaha mikro maupun makro semakin lama semakin berkembang setiap waktunya, bahkan banyak usaha mikro telah berhasil menjadi usaha makro seiring berjalannya waktu. Sebagai negara berkembang, kemajuan ekonomi Indonesia semakin baik atau terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal itu terlihat dengan banyaknya industri perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hadirnya gedung-gedung pencakar langit, daya beli masyarakat yang semakin baik, hadirnya gedung-gedung perkantoran dan bank sampai ke pelosok desa, dan lain sebagainya. Jelaslah bahwa seiring perkembangan negara semakin maju, maka pembangunan sarana dan pra-sarana akan semakin baik juga.

Sekalipun beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya terkesan positif, tetapi perlu disadari bahwa pada sisi yang lain justru “kemerdekaan” tersebut menjurus kepada hal-hal yang negatif juga. Berkembangnya suatu negara yang ditopang dengan sistem demokrasi ternyata mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya suatu bangsa akan mengakibatkan terjadinya pergeseran sosial. Dengan semangat “kemerdekaan” (bebas dari rezim orde baru yang membatasi ruang gerak masyarakat) tersebut, masyarakat Indonesia akhirnya memasuki tahap baru yang bisa membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Tahap tersebut disebut persaingan atau kompetisi.

Persaingan atau kompetisi dalam masyarakat tentu saja akan melahirkan pihak pro dan kontra. Sekalipun ada hubungannya dengan sistem ekonomi,

makalah ini tidak akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme, dan tentang baik-buruknya sistem tersebut sebagai sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia saat ini. Salah satu realitas dari kontestasi atau persaingan antar masyarakat adalah timbulnya pola hidup individualisme. Paham individualisme ini, entah secara sadar atau tidak, dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat, bahkan semakin meluas dan semakin menguat dalam realitas sosial masyarakat Indonesia sebagai imbas dari perkembangan bangsa.

Sebelum menunjukkan beberapa contoh tentang menguatnya individualisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, ada baiknya dijabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan individualisme. Menurut Mangunhardjana, dari berbagai ajaran dan doktrin ada yang amat menekankan perorangan atau pribadi. Ajaran atau doktrin itu disebut individualisme. Nama itu sesuai dengan arti akar kata asalnya. Individualisme berasal dari kata Latin *individuus*, yang dalam kata sifatnya menjadi *individualis*. Kata *individuus* dan *individualis* berarti “perorangan,” “pribadi,” dan “bersifat perorangan, pribadi.” Menurut paham individualisme, perorangan memiliki kedudukan utama; kepentingannya merupakan urusan tertinggi. Setiap orang merupakan pribadi yang otonom, berdiri sendiri. Setiap orang berhak menjadi diri sendiri. Untuk itu, setiap orang berhak mempergunakan kebebasan dan inisiatifnya. Atas dasar pemikiran itu, bagi kaum individualis, kebebasan dan kepentingan pribadi menjadi dasar dan norma hidup yang paling tinggi. Dasar kehidupan etis adalah pribadi perorangan. Dasar dan norma etis berporos pada pribadi perorangan. Yang baik adalah baik menurut selera pribadi, begitu juga, yang

jahat adalah jahat menurut selera pribadi. Individualisme menekankan tingginya kedudukan pribadi dan perorangan dengan meremehkan unsur sosial, serta mendewakan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan bersama (Mangunhardjana 1997, 107-108).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa individualisme merupakan paham atau cara hidup yang mementingkan diri sendiri dan tidak mpedulikan orang lain ataupun realitas sosial dan alam di luar dirinya. Hak untuk mendapatkan, memiliki, dan menjadi sesuatu merupakan dasar utama dibandingkan dengan berbagai kewajiban yang ada.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa perkembangan negara ke arah yang semakin baik, khususnya negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, cepat atau lambat, akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat di dalamnya dengan munculnya realitas persaingan atau kompetisi dalam segala bidang kehidupan. Menguatnya praktik individualisme di Indonesia dapat dilihat dari realitas pemerintahan (politik), ekonomi, bahkan sampai dalam lingkup lembaga terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Dalam dunia politik dan sosial secara umum, lewat pemberitaan media massa cetak maupun online, dapat dilihat banyaknya praktik korupsi yang terjadi di negara ini, baik dari tingkatan pemerintahan pusat, dewan perwakilan rakyat, sampai ke tingkat pemerintahan daerah provinsi-kota/kabupaten. Tindakan korupsi jelas merupakan suatu tindakan yang didasari oleh paham individualisme atau mementingkan diri sendiri. Para pelaku korupsi melakukan hal tersebut, tanpa memedulikan kerugian negara dan banyaknya rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dalam setiap

tahun, banyak pelaku korupsi yang ditahan oleh pihak berwajib, apalagi dengan munculnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. Ironisnya, para pelaku korupsi merupakan seseorang yang pernah menjabat posisi strategis di bidang pemerintahan negara ini, sebut saja mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota DPR RI, DPRD, top eksekutif (gubernur, walikota, bupati), dan lain sebagainya.

Masih dalam dunia politik, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam setiap pemilihan umum, tidak lepas dari realitas praktik individualisme. Ada begitu banyak calon legislatif dan calon top eksekutif yang melakukan berbagai cara yang tidak semestinya agar dirinya terpilih sebagai anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif (presiden, gubernur, walikota/bupati). Para calon legislatif maupun top eksekutif tanpa segan membodohi masyarakat dengan politik uang, janji-janji palsu, dan melakukan lobi-lobi gelap dengan pihak penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu) agar dirinya lolos hasil pemilihan umum. Individualisme kolektif juga dipertontonkan oleh para politisi ketika berbagai partai politik melakukan manuver politik untuk memenangkan calon top eksekutifnya. Kampanye gelap, menghina/menghujat calon dari partai politik yang lain, melakukan lobi terselubung dengan pihak penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya dilakukan agar supaya calon top eksekutif dari partainya menang dalam pemilihan umum.

Dalam perspektif sosial, kesejangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terlebih khusus di daerah urban, nampak terlihat dari pemandangan kota yang menempatkan

hunian masyarakat miskin yang kumuh terpisah jauh dengan hunian yang mewah seperti perumahan elit-eksklusif ataupun bangunan-bangunan apartemen. Dari kesenjangan status sosial dan jarak hunian di antara kedua kelompok masyarakat itu, dapat kita pastikan bahwa tidak mungkin kedua kelompok tersebut bisa berinteraksi. Dalam atmosfer persaingan yang terus-menerus, kita dapat melihat gejala yang kaya semakin kaya, dan yang miskin tetap statis pada tempatnya bila tidak ada usaha untuk merubah nasib. Seiring berjalannya waktu, para pemilik modal pasti akan melakukan ekspansi wilayah usahanya, dan dalam melaksanakan ekspansi tersebut ada potensi untuk melakukan “invasi” (penggusuran) untuk mendapatkan lokasi yang diinginkan dengan melakukan lobi-lobi dan suap kepada pihak yang berwenang dalam hal tersebut. Intinya, seiring berjalannya waktu, hasil yang didapatkan oleh para pemilik modal atau usaha, semakin lama semakin bertambah. Yang menjadi keprihatinan adalah sejumlah pemilik usaha atau modal jarang atau tidak sama sekali berinteraksi, bersosialisasi, apalagi berdiakonia dengan masyarakat yang berkekurangan. Dalam contoh yang kecil saja, sangat jarang para pemilik usaha berinteraksi apalagi menjamin kesejahteraan pekerjanya, sehingga satu-satunya jalan bagi para pekerja untuk menuntut kesejahteraan mereka adalah dengan melakukan unjuk rasa kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk mengontrol dan memberi kebijakan bagi para pelaku usaha. Hal ini terlihat di banyak negara, apalagi pada saat hari buruh internasional yang ditetapkan 1 Mei setiap tahunnya. Bagi sebagian pelaku usaha atau pemilik modal, mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya demi kelangsungan hidup dirinya, keluarga, dan penerus generasinya agar terus berada dalam kelimpahan

finansial dan status sosial yang tinggi menjadi dasar hidup dan usaha mereka. Hal yang ditakutkan apabila tindakan individualisme ini semakin lama akan semakin menguat dan menjangkiti para pelaku usaha baru dengan sendirinya.

Dengan semakin berkembangnya suatu negara, baik kehidupan perkotaan maupun pedesaan, sulit untuk mengelakkan diri dari individualisme. Karena tuntutan zaman dan kebutuhan hidup yang sulit tercukupi, akhirnya banyak penduduk desa yang merantau keluar desa (entah ke kota, ke luar negeri, dsb.) dalam rangka studi atau bekerja. Ada dari mereka yang setelah studi balik ke desa untuk mengabdikan dan bekerja di sana, ada juga mereka yang bekerja di luar kota datang ke kampung halaman pada hari libur. Kehadiran mereka di desa, sedikit-banyak mempengaruhi paradigma dan pola berinteraksi masyarakat secara perlahan, dan lama-kelamaan pasti akan semakin banyak orang di desa tersebut yang akhirnya ingin merantau entah untuk studi atau bekerja karena melihat kehadiran mereka di sana sebagai seseorang yang dikatakan sukses. Semakin banyak masyarakat desa yang menyelesaikan studi dan bekerja di perkantoran atau perusahaan, lambat laun akan membawa dampak bagi kehidupan desa. Artinya gaya hidup masyarakat perkotaan, lama-kelamaan akan diadopsi oleh masyarakat desa.

Masyarakat kota dapat dikatakan lebih terbiasa dengan atmosfer persaingan. Masyarakat kota harus beradaptasi dengan berbagai tuntutan. Bagi para pekerja yang hidup di kota, kesibukan dan serba cepat merupakan kata kuncinya. Pada saat menuju tempat pekerjaan, masyarakat kota sudah memulainya dengan persaingan, misalnya mengantri kereta, angkot, bus, taxi, bahkan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka akan selalu berusaha

untuk berada di antrian pertama untuk segera menaiki kendaraan yang akan dipergunakan agar tidak terlambat sampai ke tempat pekerjaan. Begitu pun dengan yang menggunakan kendaraan pribadi, jalan raya merupakan ajang persaingan, kemacetan akan selalu menuntut para pekerja untuk berangkat sedini mungkin agar tidak terlambat sampai ke tempat kerja. Setelah pulang kerja pun realitas persaingan seperti itu pun akan tetap dijumpai. Kemacetan sering mengakibatkan masyarakat kota yang bekerja sampai di kediamannya pada larut malam. Dengan rutinitas seperti itu, dapat digambarkan bahwa masyarakat kota akan selalu disibukkan dengan pekerjaan dan tidak memperhatikan lingkungan sosial tempat tinggalnya. Sekalipun hari libur, masyarakat kota sering menggunakan hari itu sebagai waktu istirahat atau mencari hiburan di luar lingkungan tempat tinggalnya. Semuanya itu dilakukan demi kepentingan diri sendiri, tanpa perlu memperhatikan realitas sosial di mana seseorang itu tinggal. Rutinitas yang digambarkan sebelumnya, lama-kelamaan akan menjadi karakter atau kebiasaan masyarakat urban. Ketidak-pekaan terhadap realitas sosial seakan menjadi karakter masyarakat urban. Karakter atau kebiasaan individualisme itulah yang dibawa oleh masyarakat yang melakukan urbanisasi ketika kembali ke kampung halamannya.

Dalam dunia hukum, kriminalitas di Indonesia seakan tak pernah ada habisnya. Setiap harinya, pasti ada berita kriminalitas yang tersaji di surat kabar ataupun media sosial elektronik. Pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya menjadi suatu potret realitas Indonesia setiap harinya. Entah apa motifnya, para pelaku kriminalitas yang melakukan perampokan, pencurian, dan lain sebagainya itu

merupakan gambaran praktik individualisme – kepentingan pribadinya terpenuhi/sukses untuk memiliki atau melakukan sesuatu.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan bangsa yang berimbas pada peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, maka kepemilikan barang elektronik menjadi suatu realitas hidup masyarakat. Kenyataan ini merupakan suatu hal yang positif, tetapi juga menjadi negatif bila berbagai alat elektronik seperti telepon seluler, komputer, dan lain sebagainya justru mengakibatkan terjadinya degradasi interaksi sosial. Dalam kehidupan keluarga, banyak ditemui bahwa setiap anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, orang tua sibuk bekerja sampai larut malam, anak-anak maupun orang tua sibuk dengan *gadget*-nya masing-masing, sehingga interaksi antar anggota keluarga semakin renggang. Intinya, alat-alat elektronik menjadi sarana untuk menyalurkan kepentingan dan kebahagiaan diri masing-masing. Suatu realitas juga terlihat bahwa anak-anak hanya menjadikan orang tuanya sebagai sumber finansial mereka untuk mendapatkan dan melakukan berbagai hal, termasuk untuk memiliki barang-barang elektronik yang terbaru, yang berhubungan juga dengan persaingan dalam pergaulan sosial. Anak-anak jarang memikirkan lagi tentang betapa sulit dan melelahkannya pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua atau saudara kandung mereka, yang penting keinginan dan kepentingannya bisa tercapai.

Sikap individualisme juga dapat dilihat dalam realitas kerohanian. Teologi atau doktrin gereja ikut mempengaruhi dan menentukan pemahaman serta sikap warga jemaatnya dalam menjalani kehidupannya. Doktrin keselamatan yang terlalu menekankan aspek eskatologis dan hanya

berlaku per pribadi (keselamatan tidak bersifat universal dan holistik), mengakibatkan warga gereja menganggap bahwa keselamatan itu hanya menjadi miliknya sendiri, komunitasnya/gerejanya atau hanya milik orang Kristen saja. Doktrin gereja yang menekankan pemisahan antara yang sakral dan profan, atau yang menyatakan bahwa dunia itu jahat, dan oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh bersahabat dengan dunia, juga mengakibatkan warga gereja lama-kelamaan terikat dengan doktrin tersebut. Dengan pemahaman yang demikian, gereja masuk dan membangun *ghetto* bagi dirinya sendiri, gereja mengisolasi dirinya sendiri dari dunia luar. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa individualisme kolektif/komunal juga terjadi.

Sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri merupakan perbuatan dosa. Menurut Reinhold Niebuhr, Alkitab mendefinisikan dosa dalam pengertian rohani dan juga moralitas. Dalam dimensi agama, dosa berarti pemberontakan manusia terhadap Allah; manusia yang berusaha untuk merebut tempat/takhta Allah. Dalam dimensi sosial dan moralitas, dosa diartikan sebagai ketidak-adilan. Penyalahgunaan ego manusia yang membuat dirinya (dalam kebanggaan atau kesombongan) menjadi pusat dari segala kehidupan atau keberadaan (*existence*), yang berimplikasi pada keinginan untuk menguasai yang tidak bisa terelakkan, sehingga mengakibatkan terjadinya subordinasi manusia yang lain ke dalam keinginannya tersebut, dan dengan demikian mengakibatkan terjadinya ketidak-adilan bagi manusia yang lain (Niebuhr 1945, 191).

Kesimpulannya, gaya hidup individualisme menunjukkan bahwa seseorang hidup bersama dirinya sendiri sudah cukup, tak perlu kebersamaan atau

bersosialisasi asalkan keinginannya bisa tercapai. Kepentingan diri pribadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kewajiban sosial. Kepuasan atau kepentingan diri sendiri menjadi tolak ukur, dengan demikian, tak perlu lagi mempertimbangkan pendapat ataupun tuntutan sosial. Individualisme menekankan tercapainya suatu keinginan atau hak pribadi sekalipun harus mengorbankan entitas lain di luar dirinya. Realitas individualisme ini turut didukung oleh kemajuan bangsa dalam segala aspek seiring berjalannya waktu. Dari berbagai uraian di atas, dapat dilihat bahwa realitas individualisme ini semakin menguat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang alamiah terjadi pada suatu negara yang sedang berkembang dan memasuki kemapanan dalam segala aspek kehidupan.

SI TOU TIMOU TUMOU TOU DAN MAPALUS SEBAGAI IDENTITAS MISIONAL GEREJA

Ketika membicarakan misi Kekristenan, maka sebagian besar orang Kristen akan selalu merujuk Matius 28:19-20 sebagai amanat agung yang harus dilaksanakan. Paradigma ini kemudian dikenal sebagai *Missio Dei* atau misi Allah atau juga misi yang diamanatkan langsung oleh Allah dalam inkarnasi Yesus, walaupun jelas bahwa paradigma misi yang lain juga dimaknai sebagai *Missio Dei*. Lewat paradigma misi yang didasari pada Matius 28:19-20 tersebut, gereja menjadi giat untuk melakukan pewartaan Injil dan berusaha “mengonversikan atau menobatkan” seseorang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Kegiatan misi ini dilakukan selama berabad-abad lamanya, yang intensitasnya meningkat pada abad delapan belas sampai pertengahan abad

kedua puluh.⁷ Abad pencerahan yang mengakibatkan muncul dan tersedianya berbagai infrastruktur, jalur komunikasi, dan transportasi, menandai kegiatan misi ini berlangsung lebih insentif. Tak jarang para misionaris melaksanakan akulturasi dengan budaya setempat demi tercapainya misi penginjilan mereka (Cavalcanti 2005, 393). Tak dapat dipungkiri, lewat praktik misional tersebut, Kekristenan kemudian menjadi agama yang terbesar di dunia saat ini (berdasarkan kuantitas pemeluknya yang tersebar di berbagai penjuru dunia; terlepas dari perbedaan denominasinya).

Walaupun dalam perkembangan dan sejarahnya, paradigma misi gereja dimaknai secara berbeda, tetapi tak dapat disangkal bahwa pangkal dari segala paradigma misi tersebut mengarah pada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah dalam inkarnasi Yesus Kristus, sekalipun juga konsep keselamatan itu sendiri akhirnya mendapat interpretasi yang berbeda pula oleh berbagai denominasi gereja.

Dalam memahami misi gereja yang sering dimaknai sebagai *missio Dei*, hal utama yang harus dijadikan dasar ialah Allah merupakan “misionaris pertama” yang mengadakan upaya penyelamatan bagi dunia dan seluruh ciptaan dari kehancuran, dosa, dan maut, yang kemudian sang “Misionaris Agung” itulah juga yang mengundang umat-Nya bersama-sama dengan-Nya untuk mengaktualisasikan dan mengerjakan keselamatan yang bersifat holistik. Misi keselamatan inilah yang menyatakan cinta

Allah kepada dunia dan ciptaan agar tidak binasa. Dengan demikian, misi gereja kemudian dapat diartikan sebagai perwujudan cinta kasih Allah yang nyata (menubuh/berwujud - *embodiment*) kepada seluruh ciptaan. Misi menjadi sarana bagi perwujudan kasih antara Allah dan ciptaan, dan juga antar ciptaan. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Blevins bahwa perwujudan kasih yang menubuh merupakan suatu wujud kasih yang mengatasi kesenjangan antara Allah dan manusia, karena kasih itu tidak hanya dilakukan oleh Allah, tetapi juga oleh manusia (Blevins 2007, 297).

Keselamatan yang dianugerahkan Yesus bersifat holistik, artinya tidak hanya berlaku untuk kehidupan yang akan datang (eskatologi) tetapi juga memiliki dimensi kekinian. Keselamatan yang dianugerahkan Yesus tersebut meliputi segala aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, keadaan manusia yang tertindas, berkekurangan, sakit, menderita, mengalami ketidakadilan, dan lain sebagainya, berhak mendapatkan keselamatan yang berasal dari Allah. Realitas tersebut merupakan suatu panggilan (*vocation*) Allah bagi gereja untuk mengerjakan misi keselamatan-Nya yang bersifat holistik (Carter 2006, 51). Dengan demikian, misi gereja bisa diartikan sebagai suatu kehadiran yang mengerjakan keselamatan Allah yang bersifat holistik.

Keselamatan yang dilakukan Allah lewat inkarnasi Yesus, memberikan pembebasan dan keselamatan bagi

⁷ Ada sebagian pihak yang membatasi periode kegiatan misional yang berlandaskan Matius 28:19-20 sampai pada pelaksanaan Konsili Vatikan II, yang ditandai dengan diterbitkannya berbagai dokumen gereja, seperti *Ad Gentes*, *Lumen Gentium*, dan lain sebagainya, yang memberi penafsiran baru terhadap paradigma misi gereja, khususnya gereja Katolik Roma. Penekanan misi gereja perlahan-lahan mulai

bergeser, dari misi penginjilan bergeser menjadi dialog dan keterlibatan dalam permasalahan sosial (kemiskinan, hak asasi manusia, ketidakadilan, dan lain-lain). Ada pula sebagian pihak yang membatasi penggunaan paradigma misi Matius 28:19-20 tersebut pada saat diterbitkan dan tersebarnya buku “Transformasi Misi Kristen” karya David Bosch.

manusia dari dosa, termasuk dosa sosial seperti yang diungkapkan oleh Niehbuhr: individualisme (egoisme) dan ketidakadilan. Teologi tentang dosa tersebut, menunjukkan bahwa gereja sebagai suatu agama, memiliki nilai-nilai kebajikan yang mengatasi paham *self-interest* (egoisme) (Tarimo 2010, 392). Selain itu, peran agama dalam ruang publik tidak hanya untuk memberikan pernyataan publik, melainkan, untuk berpartisipasi dalam membentuk kesadaran masyarakat dengan tujuan mempengaruhi praktek sosial (Tarimo 2010, 393). Dengan demikian, misi Kekristenan haruslah menyentuh aspek relasi antara realitas dunia dan kehendak Allah, dosa dan keselamatan, serta gereja dan masyarakat. Lewat perspektif tersebut, kehadiran atau keberadaan gereja pada intinya merupakan suatu keberadaan misioner yang berdimensi teologis dan sosial sekaligus.

Kehadiran gereja akan selalu mempunyai pengaruh terhadap pergeseran sosial di mana ia berada. Dengan kata lain, kehadiran gereja bisa menjadi sumber konflik, tetapi juga bisa menjadi sumber yang menghasilkan suatu transformasi sosial yang positif. Keberadaan gereja sebagai representasi dari agama Kristen ini sejalan juga dengan apa yang dikemukakan oleh Craig Calhoun. Menurut Calhoun, agama adalah suatu fenomena menakutkan yang memainkan peran kontradiktif dalam kehidupan masyarakat. Agama dapat menghancurkan atau merevitalisasi, menidurkan atau membangunkan, memperbudak atau membebaskan, mengajarkan kepatuhan atau mengajarkan pemberontakan, menjadi ancaman atau inspirasi (Mendieta 2011, 118). Di samping itu, agama menjadi dasar untuk suatu perubahan yang radikal dan memunculkan suatu pertanyaan yang radikal juga. Agama

membawa antusiasme, gairah, kemarahan, dan cinta (Mendieta 2011, 132). Secara singkat dapat dikatakan bahwa menurut Calhoun, agama memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal itu jelas karena tak bisa dipungkiri bahwa warga gereja merupakan warga masyarakat juga; warga gereja akan selalu berinteraksi dengan masyarakat luas, entah masyarakat yang juga warga gereja, tetapi juga masyarakat yang bukan warga gereja (orang Kristen).

Berdasarkan penjelasan Calhoun dan Niehbuhr, maka pada titik inilah gereja harus merumuskan apa makna kehadirannya di tempat ia berpijak, sekaligus memformulasikan apa responsnya terhadap realitas yang ada di sekelilingnya. Dengan maksud itulah juga, maka makalah ini menawarkan konsep *si tou timou tumou tou* dan semangat *mapalus* dalam rangka membahasakan Kekristenan sebagai agama mesianis dan komunitas yang selalu ingin membangun persekutuan yang bekerja sama demi memanusiaikan, menghidupkan, memberkati, menolong, melindungi, dan mensejahterakan orang lain; demi kebaikan bersama.

Inti dari *si tou timou tumou tou* menunjuk pada manusia yang kuat dan mempunyai berbagai talenta (*tou keter*), memiliki kecerdasan atau pengetahuan (*tou ngaasan*), serta memiliki kebaikan hati (*tou sama*) haruslah hidup untuk memanusiaikan dan menghidupkan manusia yang lain agar memiliki ketiga elemen *tou* (*keter*, *ngaasan*, dan *sama*) itu juga. Dengan kata lain, *si tou timou tumou tou* menunjukkan adanya suatu pola hidup yang egaliter dan senasib-sepenanggungan. Perlu diingat bahwa falsafah *si tou timou tumou tou* tersebut masih bersifat abstrak, sehingga masih perlu diejawantahkan agar menjadi suatu

hal yang praktis. Dengan demikian, maka tepatlah bahwa konsep ST4 tersebut dapat dikenakan kepada misi gereja agar menjadi suatu aksi yang nyata.

Di samping itu, inti dari *mapalus* (seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Jan Turang) ialah berasaskan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, kerja sama, dan religius, serta berprinsipkan tolong-menolong, keterbukaan, keramah-tamahan, disiplin kelompok, kebersamaan, daya guna dan hasil guna. Dengan kata lain, kebersamaan (persekutuan), kerja sama, dan tujuan bersama menjadi kata kunci untuk *mapalus*.

Dalam makalah ini, kedua konsep itulah yang hendak ditawarkan atau dikenakan menjadi paradigma dan identitas misional gereja. Dengan demikian, lewat konsep *si tou timou tumou* dan *mapalus* sebagai basis misi gereja yang diimplementasikan secara nyata, maka identitas gereja menjadi suatu komunitas yang terbuka, solider, dan bekerja sama demi memanusaiakan, menghidupkan, memberkati, serta menyelamatkan manusia yang lain, sebagai bentuk alternatif atau perlawanan terhadap menguatnya sikap individualisme (egoisme) dan ketidakadilan yang terjadi di negara Indonesia.

Paradigma misi gereja yang didasari oleh *si tou timou tumou* dan *mapalus* bisa diimplementasikan dengan berbagai cara, akan tetapi dalam makalah ini, implementasi nilai-nilai ST4 dan *mapalus* sebagai paradigma dan model misi gereja tersebut dibatasi dan difokuskan pada enam bentuk implementasi, yakni: (1) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat; (2) berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat; (3) berpartisipasi dalam

meningkatkan ekonomi masyarakat; (4) bersedia untuk melakukan advokasi hukum; (5) berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik negara; dan (6) menjadikan hospitalitas sebagai gaya hidup Kekristenan.

1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan bagi Masyarakat

Dalam sejarah kegiatan misi pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja dan lembaga zending selama berabad-abad, dunia pendidikan dijadikan salah satu pintu masuk sebelum “kabar baik” yang menjadi inti kegiatan misi diwartakan. Kegiatan itu pun berlangsung di tanah Minahasa, sehingga gereja di Minahasa, khususnya GMIM, memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang cukup banyak, dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (Universitas Kristen Indonesia Tomohon-UKIT), yang dikelola oleh yayasan-sinode dan jemaat setempat. Realitas ini pun tidak hanya terjadi di tanah Minahasa, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia yang dijadikan lokasi pekabaran Injil oleh gereja-gereja dan zending dari Eropa.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan ini, lewat konsep ST4 dan *mapalus*, gereja dimaknai sebagai suatu kehadiran yang hidup untuk mencerdaskan dan memberikan pengetahuan yang benar bagi masyarakat luas. Pengetahuan yang dimaksud ialah pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya, sekaligus pengetahuan atau wawasan yang menunjang kehidupan masyarakat agar mampu memikirkan yang terbaik bagi kelangsungan hidupnya serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Hal ini sejalan juga dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maksud tersebut bisa direalisasikan lewat pendirian atau

pengadaan fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan umum, tenaga pengajar, taman belajar, dan lain sebagainya. Gereja harus menjadi institusi atau komunitas yang berada di garis depan, menjadi pelopor dalam menyelenggarakan pendidikan yang murah dan berkualitas. Dengan demikian, upaya pendidikan yang diprakarsai oleh gereja bukan hanya sekedaranya, tetapi benar-benar bertujuan untuk mengangkat derajat (pendidikan, sosial, dan ekonomi) masyarakat lewat bekal pengetahuan yang didapat lewat upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja. Dalam menyelenggarakan proses pendidikan, gereja harus mewujudkan sekolah dengan biaya yang murah, agar supaya upaya pendidikan tersebut dapat menjangkau masyarakat miskin. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh gereja harus bersifat terbuka, artinya tidak membatasi pendidikan hanya untuk kalangan orang Kristen atau satu denominasi saja, melainkan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dengan konsep mapalus, maka usaha untuk menyelenggarakan pendidikan merupakan suatu usaha bersama (bekerja-sama) agar sebisa mungkin tersedianya pendidikan yang murah dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Selain itu, perlu disadari bahwa dasar gereja untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah dan berkualitas menunjuk pada Yesus sebagai sang “Guru Agung” yang melaksanakan karya pemuridan lewat kesaksian Injil.

2. Berpartisipasi dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Proses “memanusiakan dan menghidupkan” manusia yang lain bisa diaplikasikan lewat keterlibatan gereja dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Artinya, masyarakat yang sakit sebisa mungkin harus dipulihkan atau disembuhkan agar bisa melanjutkan tugas atau aktivitas kerjanya demi peningkatan kualitas hidup.

Kegiatan pelayanan kesehatan bisa dibuktikan lewat mendirikan dan mengadakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, bakti sosial, pengobatan gratis berkala, penyediaan obat-obatan dan suplemen makanan/vitamin, pendidikan kesehatan (seminar, pelatihan perawatan dan penanganan orang sakit, dsb.), kegiatan bersih-bersih lingkungan atau peduli sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya.

Kegiatan untuk mengadakan upaya pelayanan kesehatan ini didasarkan pada karya Yesus sendiri sebagai sang “Tabib” yang selalu dekat dengan orang yang sakit dan menderita lewat kesaksian berita Injil.

3. Berpartisipasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Selain pendidikan dan kesehatan, dalam rangka memanusiakan dan menghidupkan manusia yang lain, maka gereja juga perlu terlibat dalam permasalahan ekonomi masyarakat. Kesenjangan ekonomi semakin hari semakin kontras terlihat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini. Pengaruh globalisasi dan pasar bebas menjadi suatu ancaman bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga secara khusus bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang berpotensi membuat warga yang miskin akan semakin terpuruk dan tertindas dengan sistem ekonomi

kapitalis yang menguasai sistem ekonomi dunia saat ini. Pengaruh sistem ekonomi dunia tersebut membawa gaya hidup manusia ke arah individualisme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk itulah, gereja harus memberi perhatian besar terhadap realitas ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Menurut Rob van Drimmelen, globalisasi adalah pedang bermata dua, membawa manfaat dan membawa penderitaan bagi sebagian orang. Margaret Kaliselvi mengatakan bahwa masyarakat yang kaya dan yang berada pada kelas ekonomi menengah, menikmati peningkatan variasi dan ketersediaan barang-barang yang diproduksi dengan standar pasar global, tetapi bagi masyarakat yang miskin, harus berjuang untuk kebutuhan makannya sehari-hari, pendidikan, dan fasilitas kesehatan dasar. Selain itu, menurut Kofi Anan, di banyak negara berkembang, globalisasi dipandang bukan sebagai istilah yang menggambarkan realitas objektif, melainkan suatu ideologi predator kapitalisme. Realitas ini jelas, globalisasi merupakan suatu serangan yang berlarut-larut, sehingga mengakibatkan jutaan orang menderita dan gerakan untuk melawan kemiskinan serta penindasan menjadi terancam (Brubaker 2001, 15).

Dalam menghadapi realitas ekonomi yang diwarnai oleh proses globalisasi tersebut, maka pertama-tama, gereja harus mengajarkan warganya agar tidak bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan mereka. Warga gereja harus menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam hal kerajinan dan kerja keras demi meningkatkan kualitas hidup. Kedua, gereja harus mengajarkan warganya untuk taat pajak. Perlu dimengerti bahwa pajak digunakan oleh negara sebagai sumber finansial dalam rangka membangun berbagai infrastruktur dan merealisasikan

program kerjanya, termasuk dalam membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberian bantuan sosial. Dengan demikian, membayar pajak dimengerti sebagai suatu usaha untuk menghidupkan orang lain dan membangun bangsa-negara secara tidak langsung. Ketiga, warga gereja yang memiliki tingkat ekonomi yang memadai, diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu juga, gereja harus berupaya untuk mengajarkan warga jemaatnya untuk berdiakonia, baik secara langsung maupun tidak langsung (lewat lembaga-lembaga gerejawi maupun sosial).

4. Bersedia untuk Melakukan Advokasi Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Niehbur menyatakan bahwa dosa bermakna religius tetapi juga berdimensi sosial-moral yang terwujud dalam egoisme dan ketidakadilan. Karena ketidakadilan merupakan suatu bentuk dosa, maka gereja mau tidak mau harus berperang dan melawan segala macam tindakan ketidakadilan.

Saat ini hukum di Indonesia dipandang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya masyarakat yang miskin dan tidak mempunyai kedudukan sosial yang baik akan segera dihukum seberat-beratnya, tetapi para oknum pemerintah ataupun orang-orang yang kaya dan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi seakan kebal terhadap hukum, dan walaupun dijatuhi hukuman, tidak sebanding dengan nilai hukuman yang dijatuhi kepada orang-orang yang miskin dan tidak memiliki status sosial yang tinggi. Kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia sudah banyak

diekspos oleh berbagai media massa dan elektronik, seperti pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang remaja yang hukumannya sebanding dengan pelaku korupsi, kecelakaan yang disebabkan oleh seorang anak menteri yang mengakibatkan orang lain meninggal tetapi tidak dijatuhi hukuman, dan lain sebagainya. Di samping itu, KUHP yang merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akhir-akhir ini dimaknai berbeda oleh masyarakat luas menjadi “Kasih Uang Habis Perkara.” Ungkapan tersebut seakan mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia bisa diperjual-belikan secara bebas.

Realitas permasalahan hukum dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia menjadi suatu undangan etis bagi gereja agar tidak berdiam diri dan menutup mata serta telinga untuk memberi perhatian khusus terhadap permasalahan hukum dan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Dengan maksud itulah, maka gereja harus memberdayakan sumber daya yang berada di dalam gereja, dalam artian warga gereja yang berkecimpung dalam bidang hukum (pengacara, jaksa, hakim, dan lain sebagainya), dalam rangka membantu masyarakat agar mendapatkan jaminan hukum, keadilan, memiliki kesederajatan hak hukum, mendapatkan konsultasi hukum, dan lain sebagainya. Dengan maksud itulah juga, gereja harus mendirikan lembaga bantuan hukum atau setidaknya bermitra (bekerja sama/melaksanakan *mapalus*) dengan berbagai lembaga bantuan hukum demi melindungi (prinsip *tou keter* yang melindungi) masyarakat agar terhindar dari penyelewengan proses dan keputusan hukum oleh berbagai oknum hukum yang jahat dan mudah disuap. Keterlibatan gereja dalam menegakkan keadilan hukum

didasari pada Allah sebagai Hakim yang adil.

5. Berpartisipasi dalam Menentukan Kebijakan Politik Negara

Politik memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan politik dalam arti yang tunggal. Makalah ini tidak akan membahas tentang permasalahan definisi politik, sehingga makalah ini membatasi politik dalam arti pemerintahan dan segala kebijakan yang dihasilkannya. Jika membicarakan tentang permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara, maka politik merupakan induk yang menjadi pokok bahasan. Sistem dan bentuk politik yang digunakan dalam suatu negara akan mempengaruhi dan menentukan segala kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain, atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan politik negara akan menentukan semua ruang gerak dan segala sistem kehidupan yang terjadi di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk berperang, melaksanakan wajib militer, menolak pasar bebas, serta melarang ekspor-impor, maka bisa dibayangkan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi dan merubah segala tatanan dan aturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Dengan demikian, perlu dimaknai bahwa secara umum, kebijakan politik akan menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam negara tersebut.

Dari perspektif Kristen, politik dianggap sebagai medan pelayanan yang paling sakral, karena politik bersinggungan langsung dengan kepentingan dan kelangsungan hidup orang banyak. Lewat politik jugalah, gereja melihat bahwa pelayanan bisa

dinikmati atau tersampaikan kepada banyak orang. Dengan demikian, bisa dimaknai juga bahwa kebijakan politik suatu negara akan menentukan nasib rakyat menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Gereja melihat bahwa politik merupakan suatu kekuatan yang bisa membebaskan banyak orang dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, penjahatan, dan hal negatif lainnya. Dengan konsep *si tou timou tumou tou* dan *mapalus*, maka politik dipandang sebagai suatu upaya bersama yang bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang terbaik bagi kebaikan bersama, sehingga tidak akan ada rakyat yang sejahtera selagi rakyat yang lain sedang menderita, miskin, dan tersiksa. Mencapai kebaikan bersama merupakan tujuan dari politik.

Dengan demikian, gereja harus terlibat dalam politik karena mengingat kebijakan politik sangatlah mempengaruhi tatanan hidup dan kelangsungan hidup orang banyak. Menurut Moltmann, apabila teologi dan gereja melepaskan diri dari kebutuhan dan tuntutan politik yang lazim (bertujuan demi kebaikan bersama), maka tidak akan ada teologi pembebasan – tidak ada pembebasan manusia yang terjadi di dalam masyarakat (Moltmann 2001, 336). Menurut Moltmann, teologi dan gereja tidak hanya menyediakan interpretasi yang berbeda tentang dunia, sejarah, dan kehidupan manusia, tetapi juga mentransformasi semuanya itu. Untuk itulah, teologi membutuhkan politik untuk menjadi praksis (Moltmann 1995, 103-104). Moltmann terinspirasi oleh Karl Marx, sehingga ia beranggapan bahwa suatu teori harus bisa dipraktikkan atau diimplementasikan. Untuk itulah, maka gereja tidak boleh berada di luar dimensi politik, melainkan gereja sebagai salah satu persekutuan hidup di dalam negara, berkewajiban untuk terlibat dalam

mentransformasi realitas politik Indonesia. Gereja membutuhkan politik untuk mengejawantahkan kasih Allah kepada dunia.

Dalam keterlibatannya dengan politik, pertama-tama, gereja harus mengajarkan kepada warga gereja tentang pengertian politik yang benar dan bagaimana cara menjalankannya dengan benar. Kedua, gereja harus memberikan pendampingan pastoral secara berkala kepada warga gereja yang berkecimpung dalam dunia politik, agar politik tidak dimaknai sebagai sarana mencapai kekuasaan dan kekayaan, melainkan sebagai suatu sarana untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan demikian para politisi Kristen tidak akan menyalahgunakan jabatan politiknya yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan orang banyak. Di samping itu juga, gereja bisa memberikan sumbangsi pemikirannya bagi pemerintah lewat warga gerejanya yang berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Ketiga, gereja harus menjalankan fungsi kontrol politik. Artinya, gereja harus bersikap kritis dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap akan merugikan dan menyengsarakan orang banyak, maka gereja harus menyuarakan “suara kenabian” atau menolak kebijakan tersebut untuk diterapkan. Penolakan tersebut bisa dilakukan secara tertulis lewat gugatan langsung kepada pemerintah terkait, tulisan di media massa maupun elektronik, serta bekerja sama dengan organisasi lain yang menolak kebijakan tersebut. Gugatan terhadap kebijakan politik pemerintah tersebut haruslah dianggap sebagai sikap resmi gereja. Apabila kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah baik, maka gereja harus berada di garis depan untuk

membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

6. Menjadikan Hospitalitas sebagai Gaya Hidup Kekristenan

Dalam konsep *si tou timou tumou tou* dan *mapalus*, manusia dianggap memiliki sikap yang baik (*tou sama*), sehingga memungkinkan manusia dapat berinteraksi secara ramah dengan orang lain. Keramahtamahan merupakan salah satu unsur yang mendasari kegiatan *mapalus*. Kata lain dari keramahtamahan adalah hospitalitas.

Akhir-akhir ini, konsep hospitalitas menjadi tema yang mendominasi diskursus-diskursus teologi sebagai suatu alternatif dalam menghadapi kehadiran “yang lain” sebagai yang berlainan secara radikal, entah istilahnya disebut *lyan*, alteritas, *enigma*, *the other*, transenden, dan lain sebagainya. Secara singkat, hospitalitas berarti kebaikan/keramahtamahan dalam menyambut atau menerima tamu, orang asing, atau siapa saja (Baghi 2012, 91). Ada yang mengatakan bahwa kata hospitalitas ini diambil dari istilah *hospitari* (Latin), yang artinya perbutan bajik dalam menyapa, menerima, menyambut dan bahkan menampung dan memberi makan kepada orang-orang atau siapa saja, baik di rumah, di kota atau di dalam suatu negara.⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa istilah hospitalitas ini diambil dari bahasa Yunani, yang istilahnya juga terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Istilah yang dimaksud adalah *φιλοξενία* (*philoxenia*), yang secara harafiah artinya cinta untuk orang-orang asing – *love for strangers* (Wrobleksi

2012, 15). Dengan demikian, apapun dasar istilah yang melatarbelakanginya, baik *hospitari* maupun *philoxenia*, hospitalitas secara umum berarti mencintai dan berbuat baik kepada sesama.

Hospitalitas ini sendiri mendapat pendasaran teologis dari beberapa teolog, salah satunya Amos Yong. Yong menjelaskan konsep hospitalitas berdasarkan pengakuannya bahwa Tuhan melakukan hospitalitas kepada manusia dan seluruh ciptaan lewat tindakan inkarnasi dan peristiwa pentakosta (Yong 2007, 62). Menurut Yong, Yesus adalah sosok tamu yang patut menjadi contoh ideal untuk mengibaratkan seseorang yang pergi ke negara/daerah yang sangat jauh tempatnya (Yong 2008). Yong juga menjelaskan bahwa hospitalitas Kristen harus mengambil sikap untuk peduli pada masalah-masalah sosial (kemiskinan, kelaparan, kesenjangan ekonomi dan sosial, penindasan, marginalisasi/alienasi, dsb.), serta harus menyadari juga bahwa di dalam dirinya ada multiplisitas, yang terkadang berperan sebagai tuan rumah yang menyambut tamu, namun terkadang juga menjadi tamu yang mengunjungi tuan rumah (*as host* dan *as guest* sekaligus) (Yong 2007, 63-64).

Berdasarkan pengakuan bahwa Tuhan berhospitalitas lewat tindakan inkarnasi dan peristiwa pentakosta, Yong hendak menjelaskan bahwa Tuhan menerima seluruh ciptaan ke dalam diriNya, sekaligus juga memberi diriNya kepada seluruh ciptaan (Allah yang *hospitable*). Pengakuan bahwa Tuhan sebagai oknum yang berhospitalitas, merupakan suatu undangan bagi umat-Nya untuk melakukan hal yang sama, yaitu berhospitalitas. Artinya, warga gereja hendaknya menerima/mengakui kehadiran

⁸ Garzanti, “*I grandi dizionario Italiano, con sinonimo e contrari*,” (Roma: Garzanti Editore, 1998): 1504, dikutip dalam Felix Baghi,

Alteritas: Pengakuan, hospitalitas, persahabatan (etika politik dan postmodernisme) (Maumere-Flores: Ledalero, 2012).

orang lain, sekaligus juga memberi diri untuk berbuat baik dan beramah-tamah kepada semua orang. Konsep hospitalitas ini membahasakan falsafah *si tou timou tumou* (secara khusus konsep *tou sama*) dan *mapalus* secara teologis.

Lewat perspektif hospitalitas ini, gereja harus mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas yang *hospitable*, yang berarti komunitas yang terbuka dan solider kepada seluruh manusia. Dalam melaksanakan misinya, gereja harus bersikap terbuka, artinya misi keselamatan Allah harus ditunjukkan kepada semua manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, ataupun golongan. Di samping itu, gereja juga harus menerima semua manusia ke dalam persekutuan tanpa adanya suatu pembatasan ataupun persyaratan. Konsep ini didasari pada keberadaan seluruh manusia sebagai gambar dan rupa Allah (*imago Dei*) dan keselamatan yang dikerjakan Allah ditujukan bagi seluruh manusia serta ciptaan. Dengan demikian gereja tidak boleh menutup diri terhadap keberadaan seluruh manusia yang hadir di sekelilingnya.

KESIMPULAN

Perkembangan suatu negara ke arah yang lebih maju, yang diwarnai dengan berbagai pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, disadari atau tidak akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Sikap individualisme masyarakat merupakan suatu realitas sosial yang semakin lama semakin menguat terjadi di negara yang sedang berkembang dan yang sudah mapan. Realitas itupun terlihat dalam kehidupan sosial negara Indonesia saat ini.

Gereja akan selalu berusaha mencari makna eksistensi dirinya untuk mendasari model misi yang relevan sesuai

konteksnya. Lewat konsep *si tou timou tumou* dan *mapalus* yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan daerah Minahasa, gereja bisa memaknai kehadirannya sebagai suatu komunitas yang selalu ingin membangun persekutuan dan bekerja sama dengan orang/pihak yang lain dalam rangka memanusiakan orang ataupun pihak yang lain demi suatu kebaikan bersama. Dengan demikian, gereja bukanlah suatu komunitas individualis, tetapi justru menjadi suatu komunitas yang menentang tindakan dan gaya hidup individualisme.

Gereja merupakan suatu kehadiran teologis-sosial, artinya kehadiran gereja merupakan suatu kehadiran misional yang mengerjakan keselamatan dari Allah yang bersifat holistik, yang berdimensi eskatologis sekaligus kekinian, yang diperuntukkan bagi semua orang. Dengan demikian, kehadiran dan misi gereja merepresentasikan Kekristenan sebagai agama mesianis, bukan sebagai agama borjuis. Paradigma dan praksis misi gereja akan selalu memberi identitas bagi gereja dalam ruang publik dan sistem sosial. Di samping itu, peran dari praksis misi gereja akan senantiasa memberi dampak yang bisa mentransformasi kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 1976. *Adat istiadat sukubangsa Minahasa*. Jakarta: Bhratara.
- Baghi, Felix. 2012. *Alteritas: Pengakuan, hospitalitas, persahabatan (etika politik dan postmodernisme)*. Flores: Ledalero.
- Blevins, John. 2007. "Uncovering the eros of God." *Theology & Sexuality* 13 no. 3 (Mei): 289-300

- Brubaker, Pamela. 2001. *Globalization at what price? economic change and daily life*. Ohio: The Pilgrim Press.
- Carter, Richard. 2006. "What do the simple folk do: a Lutheran doctrine of vocation as mission work." *Missio apostolica* 14 no. 1 (May):50-57.
- Cavalcanti, H, B. 2005. "Human agency in mission work: Missionary styles and their political consequences." *Sociology of Religion* 66 no. 4 (Winter):381-398.
- Graafland, N. 1991. *Minahasa: Negeri, rakyat, dan budayanya*. Translated by Lucy R. Montolalu. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lundstrom-Burghoorn, Wil. t.t. *Gothenburg studies in social anthropology, Minahasa civilization: A tradition of change*. Gothenburg: Acta - Universitatis Gothoburgensis.
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-isme dalam etika: dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mendieta, Eduardo (Eds.). 2011. *The power of religion in the public sphere*. New York: Columbia University Press.
- Moltmann, Jürgen. 1995. *The theology of Jürgen Moltmann*. Dalam Richard Bauckham: T&T Clark Ltd.
- Moltmann, Jürgen. 2001. *The crucified God: The cross of Christ as the foundation and criticism of christian theology*. Translated by R. A. Wilson dan John Bowden: SCM Press.
- Niebuhr, Reinhold. 1945. *The nature and destiny of man, a Christian interpretation*. Vol. III. London: Nosbet & Co. LTD.
- Sondakh, A.J. 2002. *Si tou timou tumou tou: Refleksi atas evolusi nilai-nilai manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tarimo, Aquiline. 2010. "The role of religion in peacebuilding." *Afer* 51-52 no. 4-1 D (March):385-402.
- Wroblewski, Jessica 2012. *The limits of hospitality*. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press.
- Yong, Amos. 2008. *Hospitality and the other: Pentecost, Christian practices, and the neighbor*. Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Yong, Amos 2007. "The spirit of hospitality: Pentecostal perspective toward a reformatory theology of interreligious encounter." *Missiology: An International Review* no. XXXV, no.1 (January): 55-74.